

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2024



PT. BPR DANA KARYA NUSA
Jl. By Pas Ir. Soekarno, Br. Dinas Sanggulan, Ds. Banjar Anyar, Kediri,
Tabanan, Bali Telp. 0361.7993334, HP: 085333866326
email : bpr.danakaryanusa@gmail.com
email Whistleblowing System :
wbs.danakaryanusa@gmail.com

**LAPORAN PENERAPAN
TATA KELOLA**



**PT. BPR DANA KARYA NUSA
TAHUN 2024**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Alamat : Jalan By Pass Ir Soekarno Banjar Dinas Sanggulan Desa Banjar Anyar Kediri Tabanan

Nomor Telepon : 03617993334

Penjelasan Umum : Suatu Tata Kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggung jawaban (Responsibility), Independensi (Independency), dan Kewajaran (Fairness). Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut diatas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelola usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip dasar GCG dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, misi, rencana strategis, Pelaksanaan Kebijakan dan langkah-langkah Pengawasan Internal pada seluruh jenjang organisasi. Dan dimana tujuan penerapan tata kelola bank yaitu Meningkatkan Kinerja PT. BPR Dana Karya Nusa, Melindungi kepentingan stakeholders PT. BPR Dana Karya Nusa dan Meningkatkan kepatuhan manajemen dan karyawan PT. BPR Dana Karya Nusa terhadap peraturan perundang-undangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Eko Budi Handoyo	Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Jabatan direktur utama ymf kepatuhan, bertanggung jawab atas kepengurusan BPR, mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab, wajib menerapkan tata kelola, menindaklanjuti temuan audit, memastikan terpenuhinya sdm yang memadai, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam rups, mengungkapkan kebijakan bpr yang bersifat strategis dibidang kepegawaian, bertanggungjawab kepada rups dan pemegang saham dalam hal mencapai tujuan dan tindakan yang dijalankan pada bank, mewakili perusahaan didalam dan diluar pengadilan dalam segala kejadian, bertanggungjawab dalam kegiatan bank secara keseluruhan, termasuk SDM dan sebagai direktur kepatuhan menjalankan fungsinya dengan batasan yang sudah ditentukan oleh POJK Tata Kelola yang baru, mengambil keputusan, merencanakan dan menetapkan program kerja, mewakili perusahaan dalam hubungan dengan instansi lain, secara periodik memimpin rapat. Tugas dan tanggung jawab direksi ymf kepatuhan, menetapkan langkah untuk memastikan bpr telah memenuhi seluruh peraturan ojk dan perundang undangan, memantau dan menjaga agar tidak menyimpang dari peraturan, memantau dan menjaga kepatuhan bpr, melaporkan tugas dan tanggung secara berkala kepada komisaris, melakukan rapat Direksi minimal 3 kali setahun
2	I Nengah Suarta, S.S	Direktur	Jabatan direktur, bertanggung jawab atas kepengurusan BPR, mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPR, menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR, menindaklanjuti temuan audit, memastikan terpenuhi Sumber Daya Manusia, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS, mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian, menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dekom dan Pemegang Saham. Sebagai direktur bisnis bertanggung jawab terhadap tercapainya target RBB terutama target kredit dan Laba sehingga target kredit tercapai sesuai komitmen dalam RBB dan kualitas kredit tetap terjaga lancar, menjaga Likuiditas BPR tetap terjaga dan aman. Memastikan dan menjaga pos-pos keuangan utama BPR dalam kondisi sehat dan TKS BPR selalu dalam keadaan Sehat, melakukan rapat direksi minimal dalam 3 kali setahun, sesuai dengan POJK Tata Kelola yang baru menangani Operasional, Kredit, Dana Dan Operasional Lainnya

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2024 penerapan tata kelola di BPR Dana Karya Nusa telah berjalan dengan baik.

Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	I Ketut Sudarsa	Komisaris Utama	Jabatan sebagai Komisaris Utama, melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen, memastikan terselenggaranya tata kelola, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, mengarahkan pelaksanaan kebijakan strategis bpr, dalam pelaksanaan pengawasan dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional, memastikan direksi menindaklanjuti temuan audit dan temuan ojk, melaporkan pelanggaran peraturan perundang undangan kepada OJK, menanggapi dan menyetujui rencana kerja pendek dan jangka panjang direksi, melakukan pengawasan laporan, melakukan rapat satu kali dalam 3 bulan, menyampaikan hasil rapat kepada direksi, memimpin rups, mengawasi pelaksanaan tanggung jawab direksi terhadap prinsip apuppt, menyetujui kebijakan perkreditan bpr, menyetujui rencana kredit tahunan, melaporkan hasil pengawasan terhadap penerapan pedoman kebijakan perkreditan bpr kepada ojk, menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja setiap akhir semester yang dilaporkan kepada ojk, membuat pedoman tata tertib kerja serta tata tertib rapat, menyediakan waktu yang cukup kepada bank, melaksanakan tugas lain sepanjang masih berada dalam ruang lingkup fungsi dewan komisaris
2	Agung Sugiarto	Komisaris	Jabatan sebagai Komisaris, melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen, memastikan terselenggaranya tata kelola, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, mengarahkan pelaksanaan kebijakan strategis bpr, dalam pelaksanaan pengawasan dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional, memastikan direksi menindaklanjuti temuan audit dan temuan ojk, melaporkan pelanggaran peraturan perundang undangan kepada OJK, menanggapi dan menyetujui rencana kerja pendek dan jangka panjang direksi, melakukan pengawasan laporan, melakukan rapat satu kali dalam 3 bulan, menyampaikan hasil rapat kepada direksi, memimpin rups, mengawasi pelaksanaan tanggung jawab direksi terhadap prinsip apu ppt dan/atau pppspm, menyetujui kebijakan perkreditan bpr, menyetujui rencana kredit tahunan, melaporkan hasil pengawasan terhadap penerapan pedoman kebijakan perkreditan bpr kepada ojk, menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja setiap akhir semester yang dilaporkan kepada ojk, membuat pedoman tata tertib kerja serta tata tertib rapat, menyediakan waktu yang cukup kepada bank, melaksanakan tugas lain sepanjang masih berada dalam ruang lingkup fungsi dewan komisaris

Rekomendasi Kepada Direksi

Dewan komisaris sudah memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola di BPR Dana Karya Nusa dengan baik

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tugas dan tanggung jawab komite NIHIL karena BPR Dana Karya Nusa belum memiliki komite.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota direksi PT BPR Dana Karya Nusa tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Eko Budi Handoyo	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	I Nengah Suarta,S.S	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota direksi PT BPR Dana Karya Nusa tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota direksi lain, anggota dewan komisaris dan pemegang saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Eko Budi Handoyo	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	I Nengah Suarta,S.S	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota direksi PT BPR Dana Karya Nusa tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi lain, anggota dewan komisaris dan pemegang saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan komisaris PT BPR Dana Karya Nusa tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan komisaris PT BPR Dana Karya Nusa tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	I Ketut Sudarsa	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Agung Sugiarto	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan komisaris PT BPR Dana Karya Nusa tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota dewan komisaris lain, anggota direksi dan pemegang saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	I Ketut Sudarsa	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Agung Sugiarto	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan komisaris PT BPR Dana Karya Nusa tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lain, anggota direksi dan pemegang saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	406296000	2	192456000
2	Tunjangan	2	57858000	2	40038000
3	Tantiem	2	73400000	2	26281666
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		537554000		258775666

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Paket/kebijakan remunerasi bagi direksi dan dewan komisaris PT BPR Dana Karya Nusa ditetapkan berdasarkan RUPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	Mobil Dinas, BBM, Service, Asuransi allrisk/1 unit (untuk direktur utama), Mobil Dinas (sewa untuk direktur), BBM	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan/2 unit, BPJS Ketenagakerjaan /2 unit	BPJS Kesehatan/2 unit, BPJS Ketenagakerjaan /2 unit
4	Fasilitas lainnya	Asuransi pensiun (DPLK)/2 unit, Tunjangan pajak PPH21/2 unit, Biaya perjalanan dinas/perdiem (BPD)/2 unit, cuti tahunan/2 unit	Asuransi pensiun (DPLK)/2 unit, Tunjangan pajak PPH21/2 unit, Biaya perjalanan dinas/perdiem (BPD)/2 unit, cuti tahunan/2 unit

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sudah berdasarkan RUPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,01	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,10	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,50	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,28	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau ketentuan perundangan-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan selama 1 tahun

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	03-06-2024	4	1.Penjelasan Rencana bisnis BPR, Realisasi RBB dan Evaluasi RBB Mei 2024, 2. Isu-isu strategis BPR, 3.Penerapan APU PPT PPPSPM, 3. Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko,4. Penyelenggaraan Tehnologi Informasi
2	24-07-2024	4	1.Penjelasan Rencana bisnis BPR, Realisasi RBB dan Evaluasi RBB Juni 2024, 2. Isu-isu strategis BPR, 3.Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pemeriksaan OJK, KAP, 4. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja PE Audit Internal, PE Kepatuhan dan Manrisk, 5. Penerapan APU PPT PPPSPM, 6. Pemenuhan SDM yang kosong, 7. Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko, 8. Penyelenggaraan Tehnologi Informasi
3	01-10-2024	4	1.Rencana bisnis BPR,2.Isu-isu strategis BPR,3.Evaluasi/penetapan kebijakan strategis,4.Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR
4	03-12-2024	4	1.Rencana bisnis BPR,2.Isu-isu strategis BPR,3.Evaluasi/penetapan kebijakan strategis,4.Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR, 5. Persetujuan dan Pengesahan RBB Tahun 2025

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pelaksanaan Rapat di tahun 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	I Ketut Sudarsa	4	0	100,00
2	Agung Sugiarto	4	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kehadiran anggota dewan komisaris 100%

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Jumlah penyimpangan internal (internal fraud) tahun 2024 NIHIL

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Permasalah hukum yang dihadapi PT BPR Dana Karya Nusa NIHIL (tidak ada permasalahan hukum baik perdata atau pidana)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	I Nengah Suarta, S.S	Direktur	Eko Budi Handoyo	Direktur Utama	Sewa Mobil	42.000	untuk penggunaan mobil operasional direktur

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik belum ada (nihil) pada tahun 2024

Nama BPR	: PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa
Posisi Laporan	: 31-12-2024
Alamat	: JL BY PASS IR SOEKARNO SANGGULAN BANJAR ANYAR KEDIRI TABANAN
Nomor Telepon	: (0361)-7993334
Modal Inti BPR	: 10.326.734.853,00
Total Aset BPR	: 41.438.345.266,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,9
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Berdasarkan kertas kerja self assessment tata kelola bagi BPR (Good Corporate Governance) pada posisi akhir Desember 2024 dapat disampaikan kesimpulan umum hasil self assessment good corporate governance sebagai berikut : Peringkat komposit dan predikatnya yaitu di posisi Peringkat komposit 2 dimana mencerminkan kondisi BPR yang secara umum baik dan sehat. Dengan ini PT BPR Dana karya Nusa berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) yang menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,59	0,70	0,20	1,49	0.298	umlah anggota direksi sudah sesuai ketentuan BPR dengan modal inti kurang dari lima puluh milyar rupiah. Salah satu direksi adalah direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Seluruh anggota direksi telah lulus uji kemampuan, tugas dan tanggung jawab dilakukan dengan baik
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,78	0,80	0,20	1,78	0.267	Sudah sesuai ketentuan dengan jumlah anggota dewan komisaris 2 orang. Anggota komisaris PT BPR Dana Karya Nusa sudah lulus uji kemampuan dan melakukan tugas tanggung jawab sesuai ketentuan
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Modal inti kurang dari 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) belum memiliki komite
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	BPR sudah memiliki SOP benturan kepentingan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Salah satu direksi adalah direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan sudah ada Pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	0,90	0,20	2,10	0.210	Penerapan fungsi audit intern sudah dilakukan oleh pejabat eksekutif yang menangani fungsi audit
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0.050	Sudah dilaksanakan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Tidak terdapat pelanggaran BMPK sampai dengan bulan desember 2024
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Rencana bisnis bank di tahun 2024 sudah disetujui oleh dewan komisaris dan disupport oleh pemegang saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Bank menyampaikan informasi secara transparan dan saat ini corebanking system BPR sudah berbentuk IBS sehingga laporan bersifat tepat dan realtime
Nilai Komposit						1.9	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah anggota dewan komisaris 2 orang
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota komisaris 2 orang
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	sudah sesuai ketentuan, dewan komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Komisaris utama bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan BPR
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR modal inti kurang dari 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	sudah sesuai ketentuan, Dewan komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Dewan komisaris tidak merangkap jabatan dewan komisaris tidak lebih dari 2 BPR
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Anggota dewan komisaris tidak memiliki hubungan keluarga

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	sudah sesuai ketentuan, dewan komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi dan pemegang saham.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	1,56	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,78	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	sudah sesuai ketentuan, Dewan komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihan kepada Direksi.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	sudah sesuai ketentuan, Dalam melakukan pengawasan Dewan komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan stategis BPR.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	sudah sesuai ketentuan, Dewan komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	sudah sesuai ketentuan, Dewan Komisaris selalu memastikan agar Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Sudah sesuai ketentuan

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	sudah sesuai ketentuan
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	sudah sesuai ketentuan, Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan lainnya.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	sudah sesuai ketentuan, hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	Sudah sesuai ketentuan, BPR sudah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Sudah sesuai ketentuan, Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Sudah sesuai ketentuan, benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Sudah sesuai ketentuan, anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Sudah sesuai ketentuan, Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	Sudah sesuai ketentuan, BPR sudah menunjukan Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Sudah sesuai ketentuan, Satuan kerja kepatuhan atau pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	Sudah sesuai ketentuan, BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Sudah sesuai ketentuan, Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Sudah sesuai ketentuan, Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR anatara lain melakui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Sudah sesuai ketentuan, Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	Sudah sesuai ketentuan

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Sudah sesuai ketentuan
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	Sudah sesuai ketentuan, memiliki pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Sudah sesuai ketentuan
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Sudah sesuai ketentuan
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Sudah sesuai ketentuan
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Sudah sesuai ketentuan

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR dengan modal inti kurang dari 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Sudah sesuai ketentuan
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Sudah sesuai ketentuan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR dengan modal inti kurang dari 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Sudah sesuai ketentuan
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Sudah sesuai ketentuan
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	Sudah menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	Sudah sesuai ketentuan
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Sudah sesuai ketentuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Sudah sesuai ketentuan
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	Sudah sesuai ketentuan
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	Sudah sesuai ketentuan
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sudah sesuai ketentuan
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Sudah sesuai ketentuan
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Sudah sesuai ketentuan
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Karya Nusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR DANA KARYA NUSA

Demikian laporan tata kelola tahun 2024 yang dapat kami sampaikan, harapannya PT BPR Dana Karya Nusa ditahun berikutnya dapat menerapkan tata kelola lebih optimal.

Tabanan, 23 Januari 2025

PT BPR DANA KARYA NUSA



I Ketut Sudarsa
Komisaris Utama

BANK DANA KARYA
PT BPR Dana Karya Nusa



Eko Budi Handoyo
Direktur Utama YMF Kepatuhan

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : **PT BPR DANA KARYA NUSA**
Posisi Laporan : 31 Desember 2024
Alamat : Jl By Pass Ir Soekarno, BR Dinas Sanggulan, Ds Banjar Anyar, Kediri,
Tabanan
No Telepon : 0361-7993334
Modal Inti BPR : Rp. 10.785.335.410-
Total Aset BPR : Rp. 41.438.345.266,43-
Bobot BPR : B
Status Audit Ekstern : 1
Nilai Komposit : 1,9
Peringkat Komposit : 2

Berdasarkan kertas kerja self assessment tata kelola bagi BPR (Good Corporate Governance) pada posisi akhir Desember 2024 dapat disampaikan kesimpulan umum hasil self assessment good corporate governance sebagai berikut :

1. Nilai komposit dan peringkat komposit dan predikatnya :

Hasil perhitungan Nilai Komposit sebesar 1.9 dan predikat kompositnya ada di posisi 2 dimana mencerminkan kondisi BPR secara umum baik dan sehat.

2. Peringkat masing-masing faktor :

No	Faktor	Peringkat
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	0,298
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	0,267
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0,000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	0,200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR	0,200
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	0,210
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	0,050
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	0,200
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	0,150
10	Rencana Bisnis BPR	0,150
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan serta Pelaporan Internal	0,150
Nilai Komposit		1,9
Peringkat Komposit		2

Dengan ini PT BPR Dana Karya Nusa berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan dan menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik yang senantiasa menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi.

Tabanan, 23 Januari 2025
PT BPR DANA KARYA NUSA



I Ketut Sudarsa
Komisaris Utama



BANK DANA KARYA
PT BPR Dana Karya Nusa



Eko Budi Handoyo
Direktur Utama YMF Kepatuhan